

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat secara finansial mampu untuk membayar pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2013), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak merupakan instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan yaitu Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, seperti pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assesment* yang memberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan baik menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem ini akan aktif diterapkan dalam suatu negara apabila kondisi kepatuhan sukarelayang ada pada diri setiap masyarakat telah terbentuk, sehingga ada unsur paksaan dari pihak manapun (Agustiantono, 2012). Sistem perhitungan sendiri ini juga merupakan bentuk dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari individu-individu yang tergolong dalam Warga Negara Indonesia dan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selanjutnya akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung sendiri jumlah nominal yang akan dibayar, menyetorkan hasil penghitungan tersebut, serta melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dibagikan oleh pihak Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak).

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban

tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi yang melanggar pajak. Oleh karena itu, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Membayar pajak bukanlah tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu bagi masyarakat. Pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan berbelanja (Hardaya, 2013).

Beberapa faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan wajib pajak, mempunyai kemungkinan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak..

Beberapa penelitian mengenai perpajakan telah dilakukan oleh para peneliti, seperti penelitian oleh Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fikriningrum (2012), Arum (2012), dan Rantung dan Priyono (2009) faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak yang dapat menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010), menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dilakukan pembahasan pada penelitian ini, yaitu :

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo:

Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo guna mengetahui penyebab ketersediaan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Penulis:

Dapat memberikan gambaran bagi penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

3. Bagi Pihak Lain:

Dapat berguna sebagai dasar penelitian yang sejenis untuk masa yang akan datang dan dapat dijadikan sumber pustaka yang dapat menambah wacana baru.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian, pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variabel penelitian dan devinisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, gambaran Wajib Pajak di KPP Pratama Sukoharjo, deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V: PENUTUP

Berisi dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.